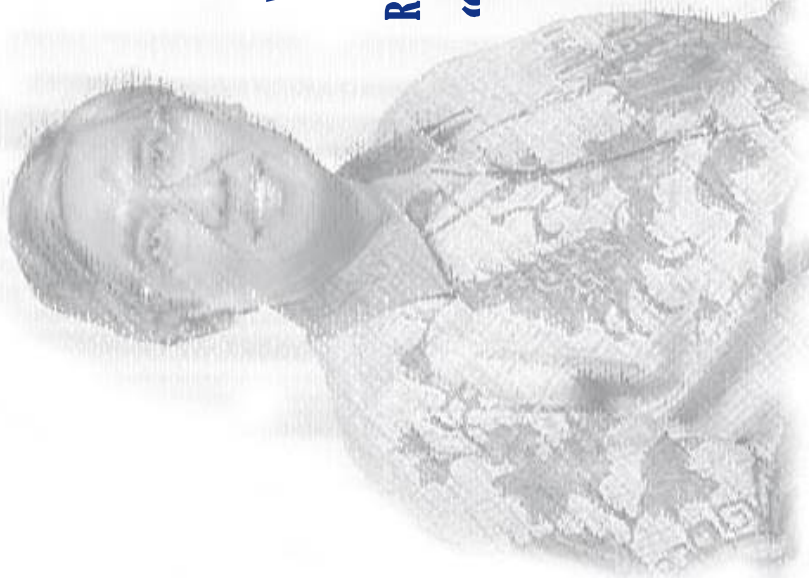




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEMINAR NASIONAL HARI OEANG KE 71 TAHUN 2017

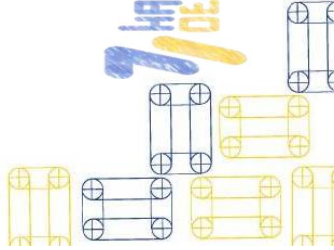


KEYNOTE SPEECH DAN PEMBUKAAN

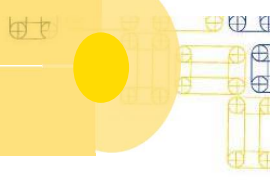
Prof. MARDIASMO
WAKIL MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

REFLEKSI DINAMIKA DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA:
“DESENTRALISASI FISKAL SOLUSI
BANGSA SEJAHTERA”

Jakarta, 18 Oktober 2017



Kerja Nyata
Membangun Negeri



Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan

Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat

Indonesia ke depan **pintu gerbang** kemerdekaan

Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, **adil dan makmur**.



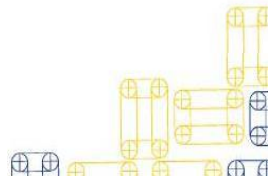
SAAT INI, KITA BERTANGGUNG JAWAB KARENA MEMEGANG ESTAFET TANGGUNG JAWAB DAN KEPEMIMPINAN...

Proses Formulasi Dasar Negara RI

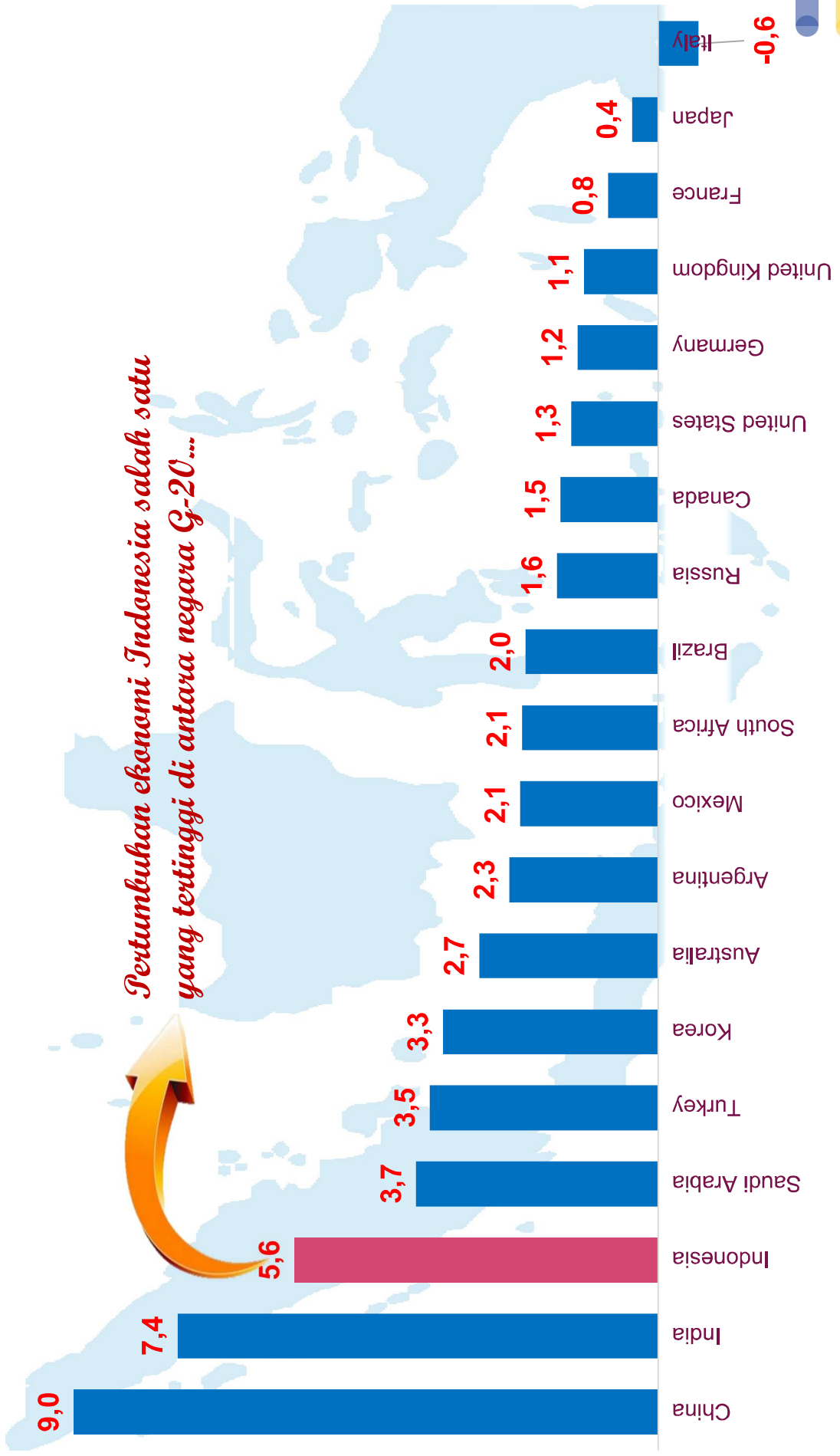
- melindungi segenap bangsa dan tanah tumpah darah Indonesia
- memajukan kesejahteraan umum,
- mencerdaskan kehidupan bangsa,
- ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Estafet Kemerdekaan

Kita saat ini memegang estafet kemerdekaan dan bertanggung jawab untuk membawa Indonesia makin mendekati tujuan kemerdekaannya



PERKEMBANGAN MAKROEKONOMI: PERTUMBUHAN EKONOMI



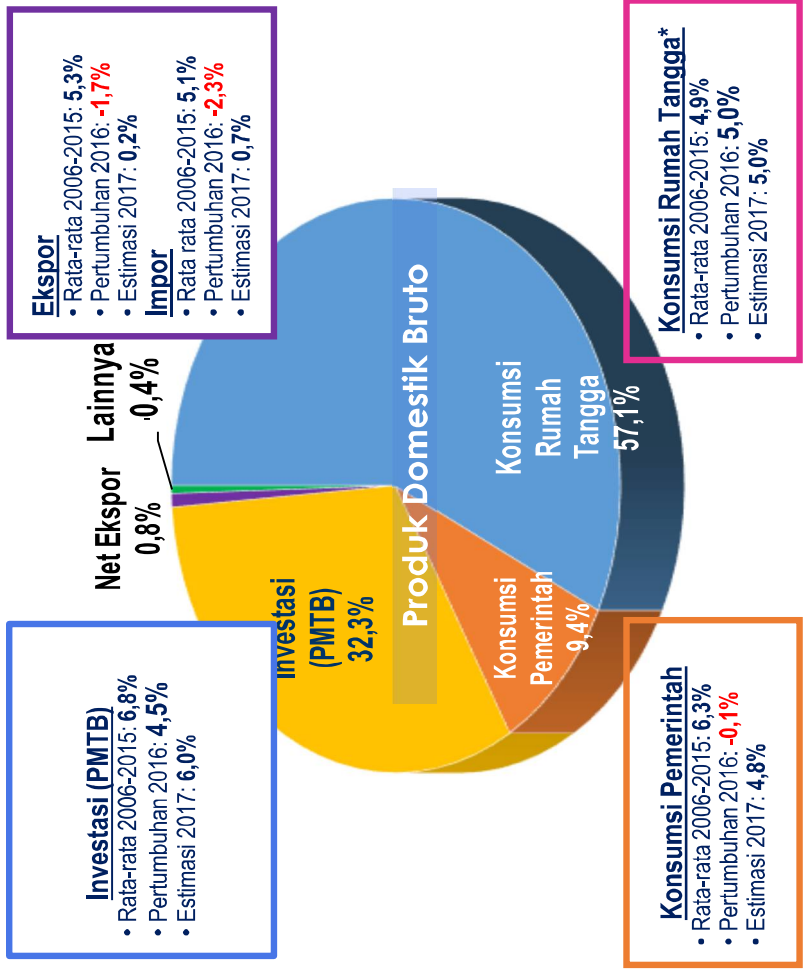
- INTEGRITAS
- PROFESIONALISME
- SINERGI
- PELAYANAN
- KESEMPURNAAN

PERKEMBANGAN MAKROEKONOMI: SUMBER PERTUMBUHAN PDB

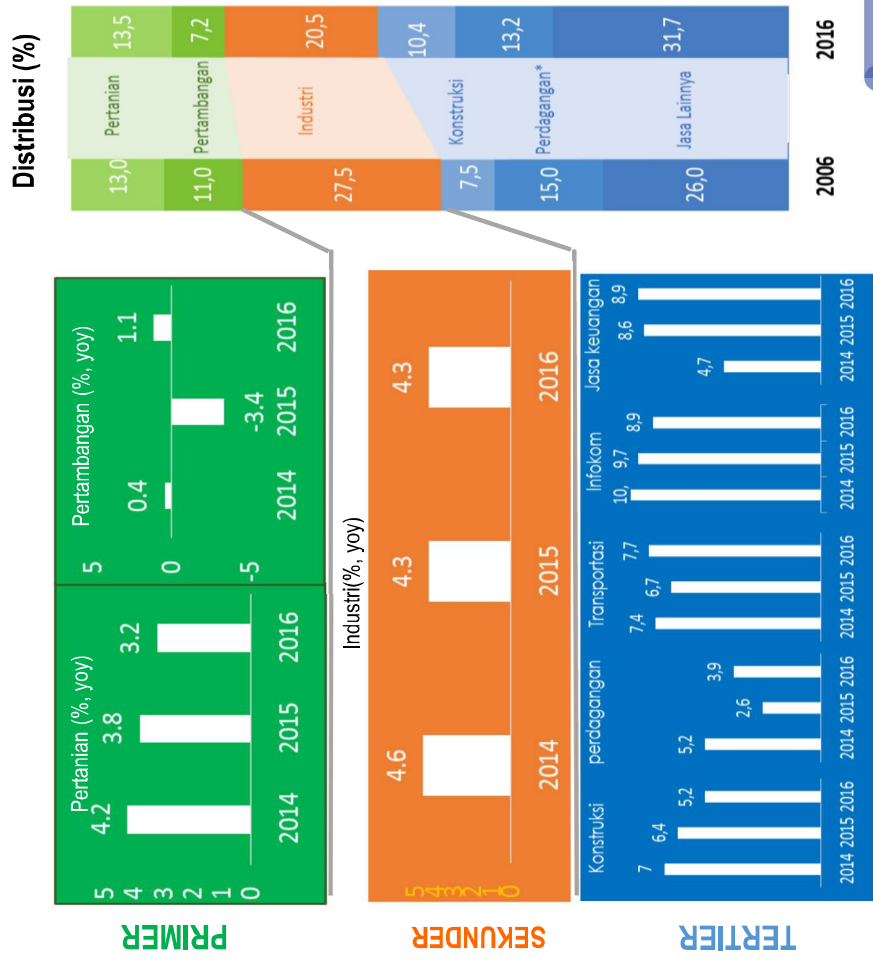


Pertumbuhan PDB ditopang oleh Konsumsi Rumah Tangga dan Investasi (sisi pengeluaran) sebagai "engines of growth", serta pertumbuhan sektor pertambangan yang positif (sisi produksi).

SISI PENGELUARAN



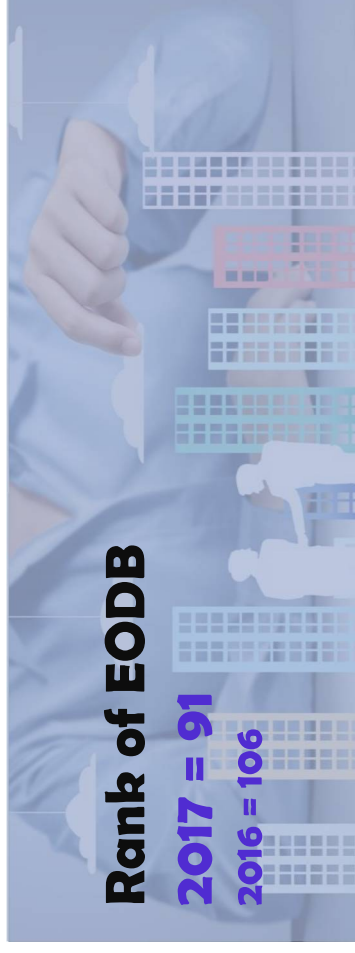
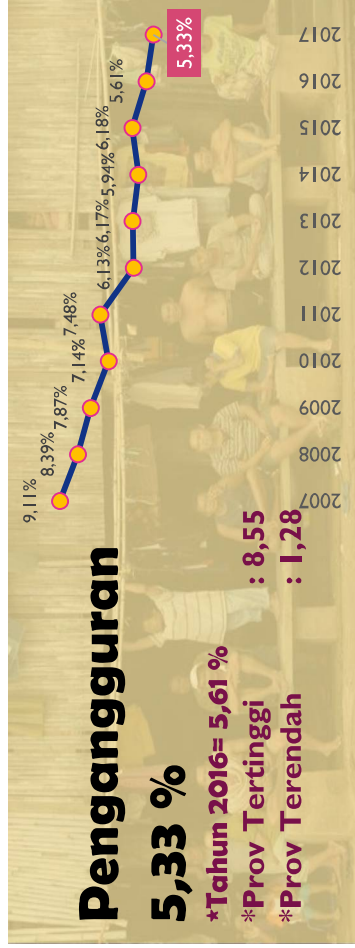
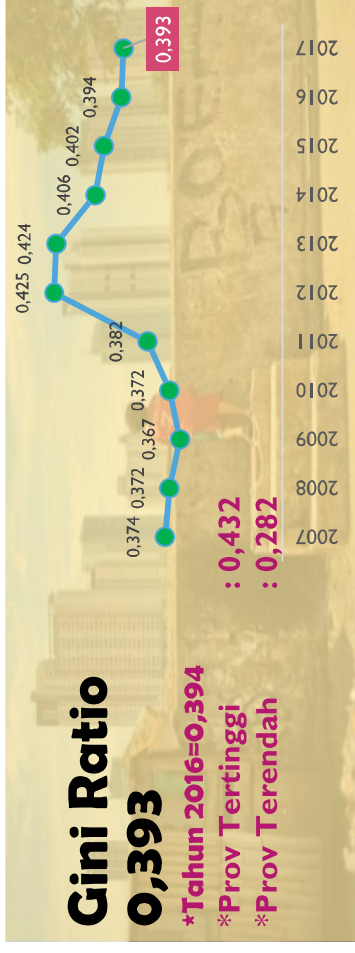
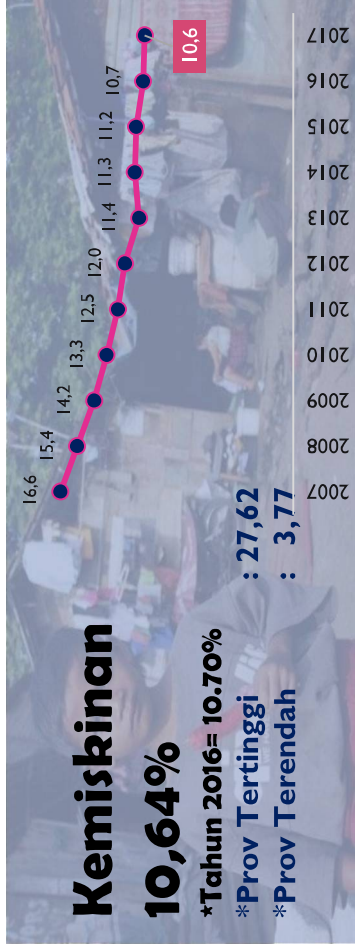
SISI PRODUKSI



- INTEGRITAS
- PROFESIONALISME
- SINERGI
- PELAYANAN
- KESEMPURNAAN

PERKEMBANGAN MAKROEKONOMI: INDIKATOR SOSIAL-EKONOMI

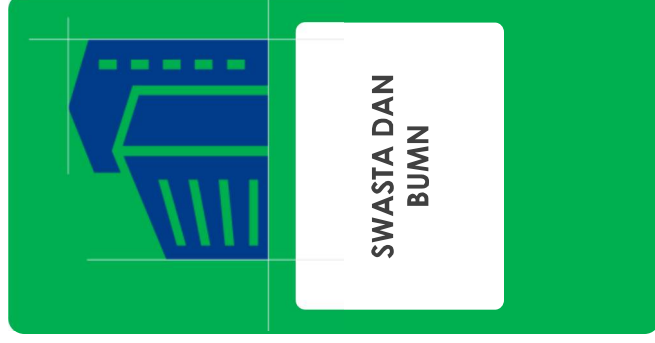
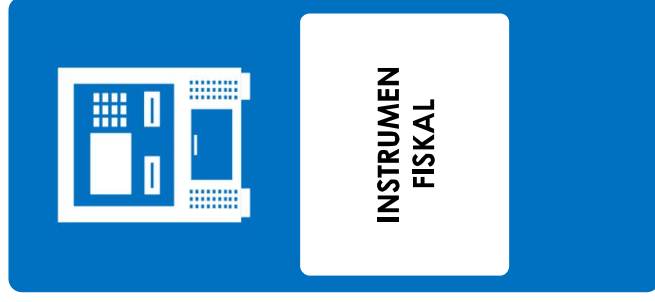
Berbagai indikator ekonomi dan sosial mengalami perbaikan yang nyata.....



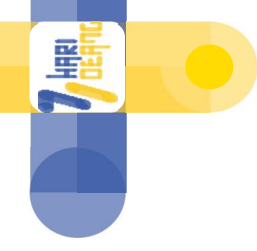
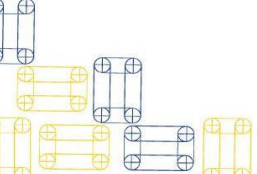
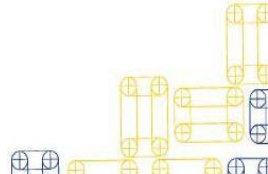
Ket: * data per semester 1 (maret) 2017

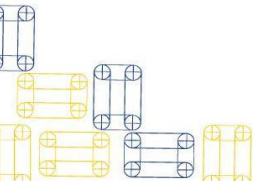
PENGLOLAAN APBN : INSTRUMEN PERTUMBUHAN & PEMBANGUNAN

*Sinergi Kebijakan Fiskal, Moneter Dan Sektor Riil Untuk Mencapai
Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan*

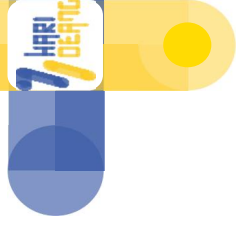


PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH





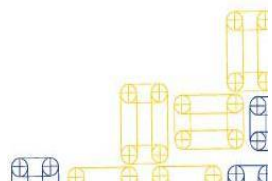
PENGELOLAAN APBN : TIGA PILAR UTAMA KEBIJAKAN FISKAL



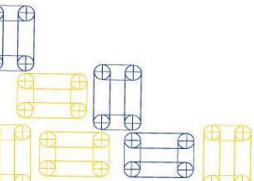
Optimalisasi
**Penerimaan
Negara** + **Belanja Negara**
yang Produktif
dan Berkualitas + Pengelolaan
Pembiayaan
yang Pruden

APBN yang kredibel, efisien dan efektif, serta berkesinambungan

**STIMULUS YANG OPTIMAL BAGI
PERTUMBUHAN EKONOMI**



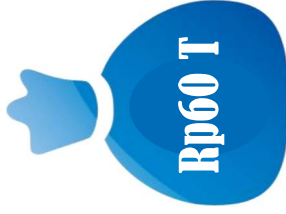
- INTEGRITAS
- PROFESIONALISME
- SINERGI
- PELAYANAN
- KESEMPURNAAN



PENGELOLAAN APBN : BUDGETING IS AN ART



Penganggaran adalah suatu seni (art) dalam mengalokasikan sumber-sumber pendanaan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat...



Anggaran Dana Desa

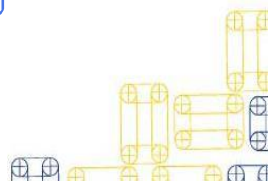
	<p>PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)</p> <ul style="list-style-type: none"> • mensejahterakan 30 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
	<p>SUBSIDI PANGAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 45 juta (KPM)
	<p>BANTUAN PANGAN NON TUNAI</p> <ul style="list-style-type: none"> • 40 juta KPM
	<p>PENERIMA BANTUAN KESEHATAN</p> <ul style="list-style-type: none"> • 92,4 juta jiwa;
	<p>PROGRAM INDONESIA PINTAR</p> <ul style="list-style-type: none"> • mencerdaskan 100 juta siswa



Dana Desa
Untuk 74,954 Desa

- Bidang Pembangunan
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat

- INTEGRITAS
- PROFESIONALISME
- SINERGI
- PELAYANAN
- KESEMPURNAAN



Desentralisasi Fiskal Pilihan Kebijakan Fiskal Pasca Reformasi 1999

Pasal 18, Bab VI UUD 1945:

Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah provinsi & daerah provinsi dibagi atas kab & kota, masing-masing mempunyai pemda. Pemerintah provinsi, kabupaten, & kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.



Pasal 18A Ayat (1)

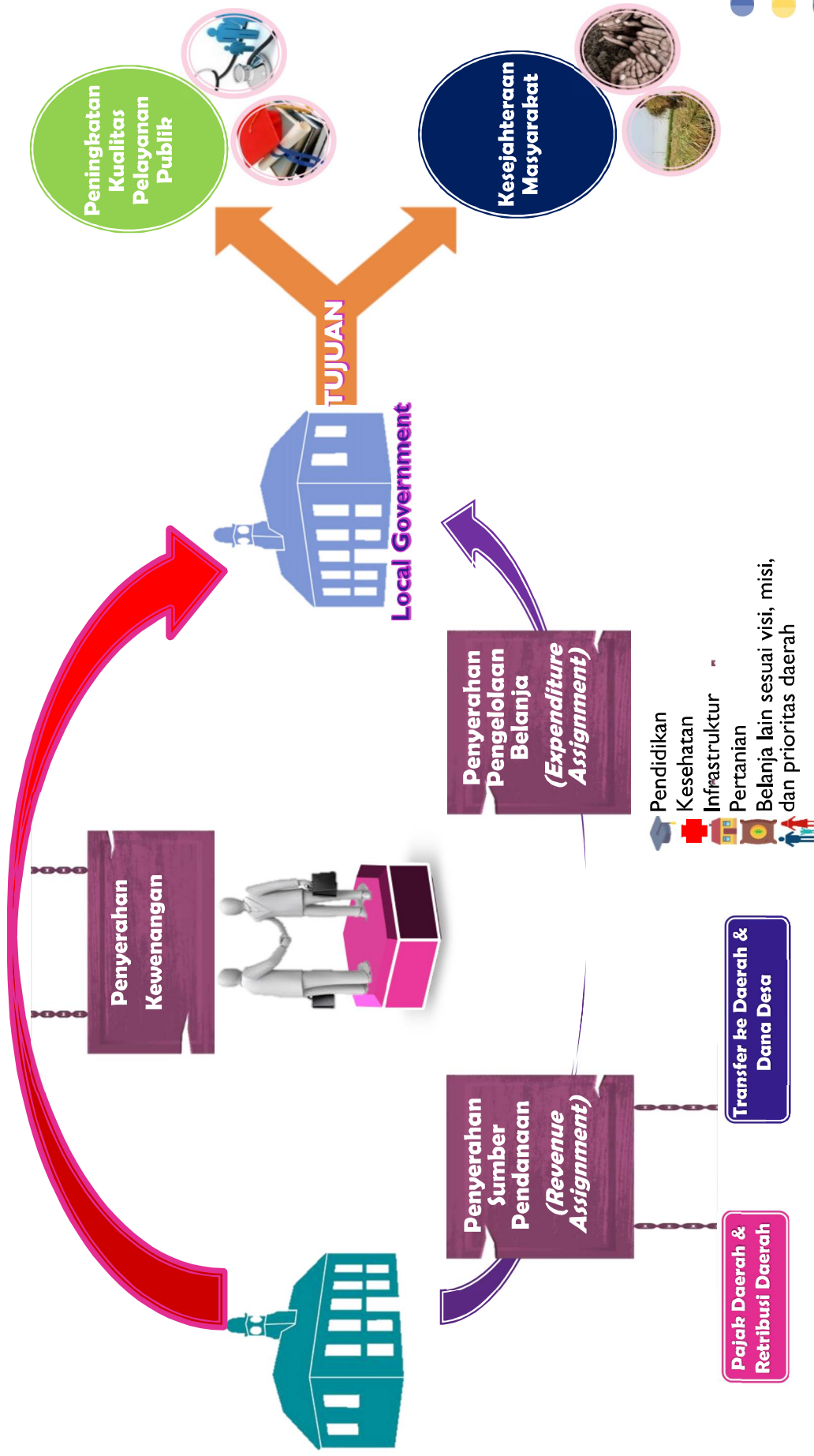
“Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”

Pasal 18A Ayat (2)

“Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”

FILOSOFI DESENTRALISASI FISKAL: HUBUNGAN KEWENANGAN & KEUANGAN DAERAH

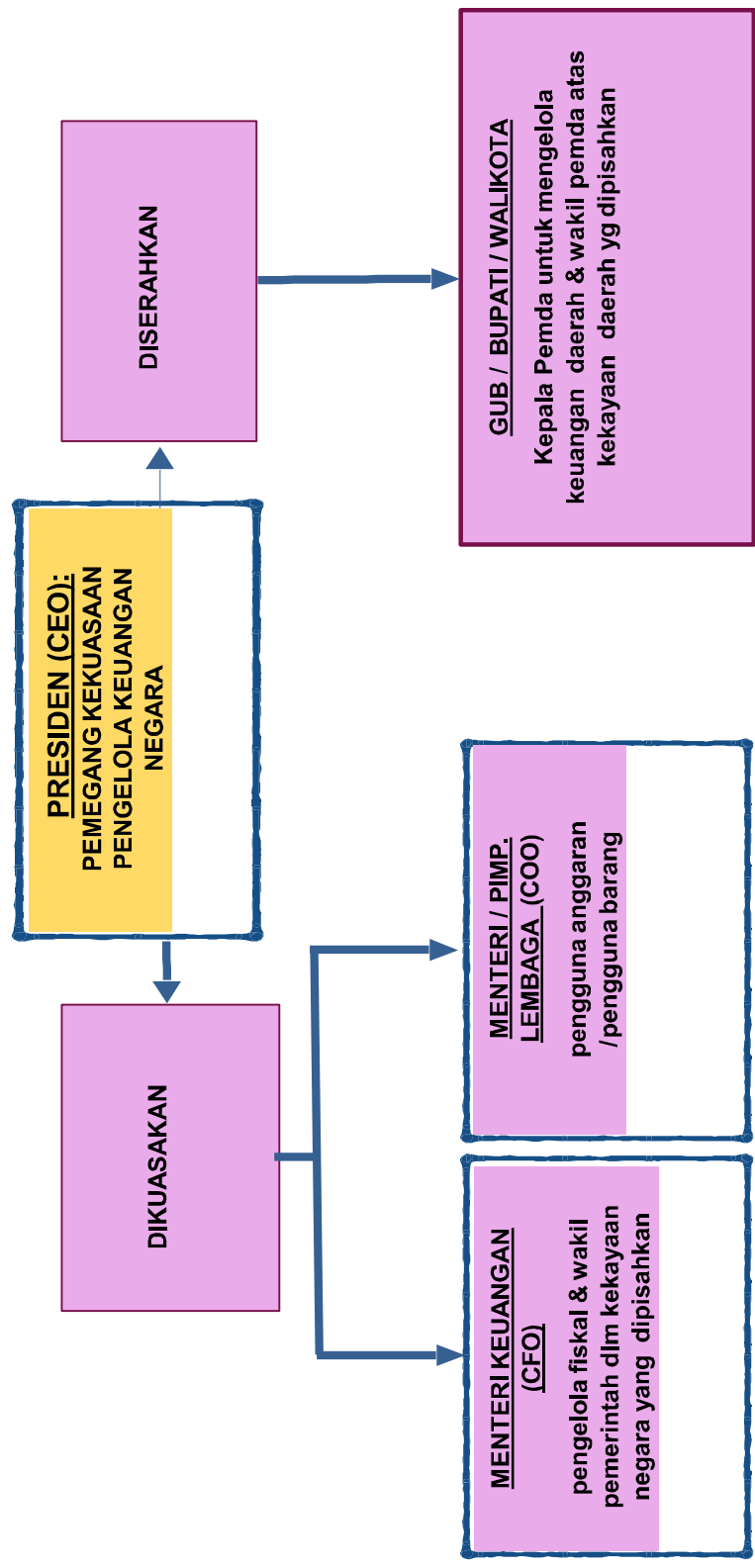
Otonomi daerah dan Desentralisasi Fiskal adalah penyerahan kewenangan dan sumber-sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan rumah tangga berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka NKRI.



FILOSOFI DESENTRALISASI FISKAL: PEMBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

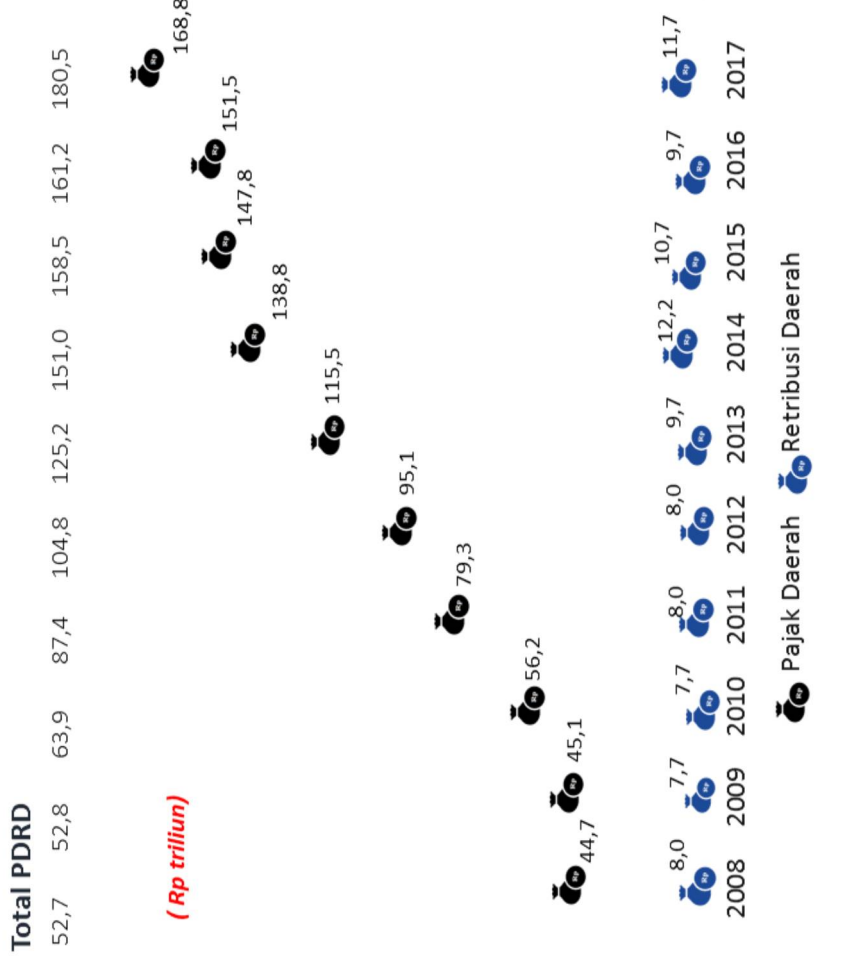
Sesuai dengan amanat Pasal 6 UU Nomor 17 tahun 2003, Pengelolaan Keuangan Negara dikuasakan dari Presiden kepada Menteri Keuangan sebagai Chief Financial Officer (CFO) dan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Chief Operating Officer (COO), serta diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam pengelolaan keuangan daerah.

UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

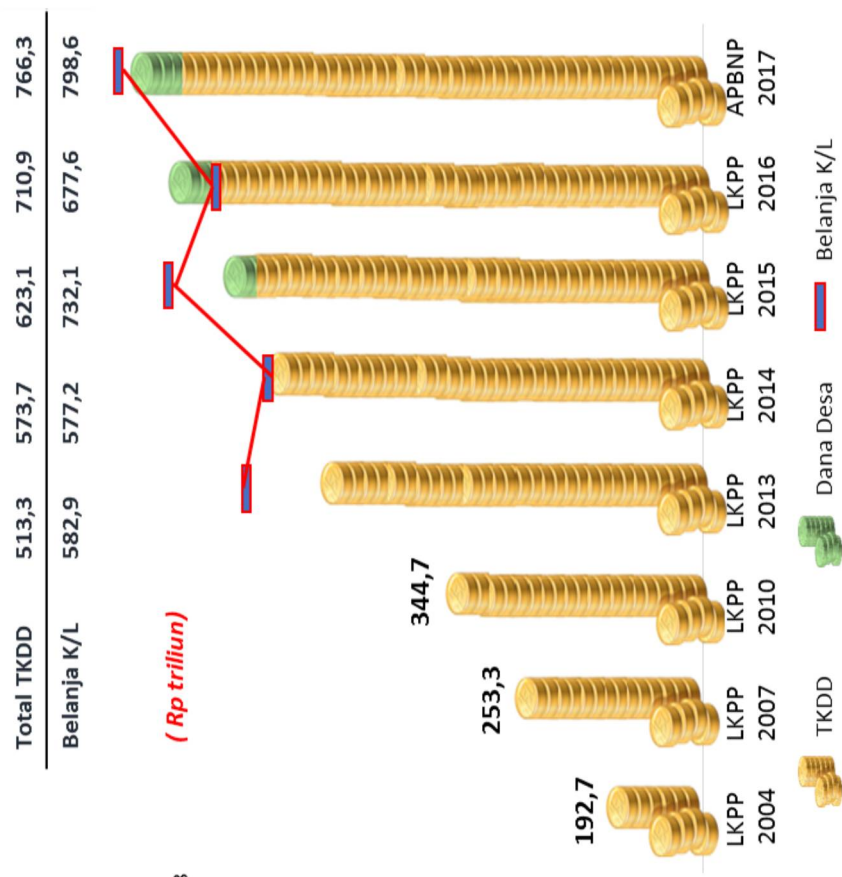


INSTRUMEN DESENTRALISASI FISKAL: SISTEM PERPAJAKAN DAERAH DAN SISTEM TRANSFER KE DAERAH

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



Transfer ke Daerah dan Dana Desa



Sejak diimplementasikannya UU 28/2009, besaran dan kontribusi dari PDRD telah meningkat secara signifikan dari **Rp13,0 triliun** atau **11,9%** dari pendapatan daerah pada tahun 2001 menjadi **Rp180,5 triliun** atau **16,6%** dari total pendapatan daerah pada tahun 2017.

Tahun 2017, anggaran TKDD sebesar **Rp766,3 T** atau meningkat **9 kali lipat dari tahun 2001** (awal desentralisasi fiskal) sebesar Rp81,1 T. Porsi anggaran **TKDD** tersebut mencapai **36,3%** dari belanja **APBN**.

INSTRUMEN DESENTRALISASI FISKAL: PERKEMBANGAN KEBIJAKAN DESENTRALISASI FISKAL DI INDONESIA

Sebelum 2001



Subsidi Daerah Otonom

- Sekitar 95% untuk gaji PNSD
- Penggunaan dari transfer telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat



Bantuan Inpres

- Bantuan pembangunan daerah baik bersifat umum atau khusus yang diberikan atas Instruksi Presiden



Dana Sektoral

- Dana yang dialokasikan kepada instansi vertikal merupakan bagian dari pemerintah pusat
- Mekanisme DIP (Daftar Isian Proyek)

2001 - sekarang

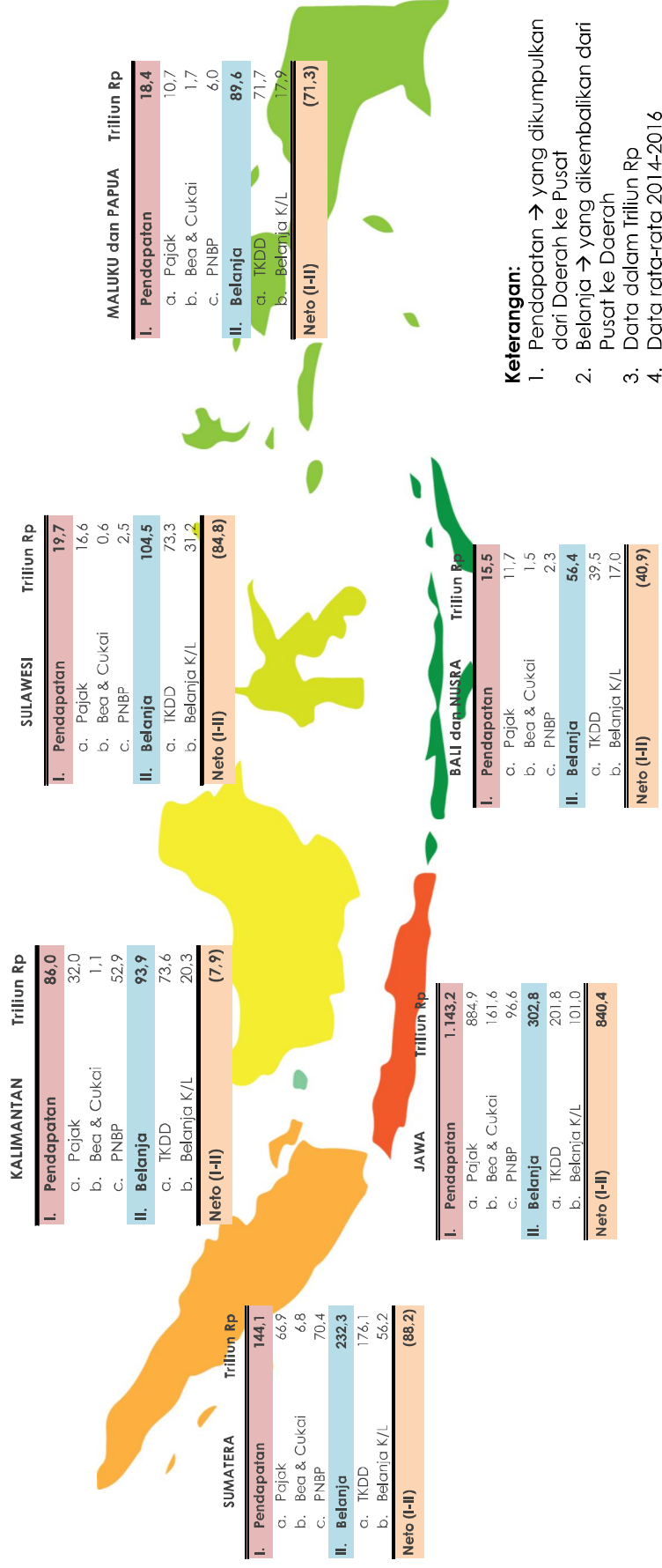
2015	2016 & 2017
I. TRANSFER KE DAERAH	I. TRANSFER KE DAERAH
A. Dana Perimbangan	A. Dana Perimbangan
1. Dana Bagi Hasil	1. Dana Transfer Umum
2. Dana Alokasi Umum	a. Dana Bagi Hasil
3. Dana Alokasi Khusus	b. Dana Alokasi Umum
B. Dana Otonomi Khusus	2. Dana Transfer Khusus
C. Dana Keistimewaan DIY	a. DAK Fisik
D. Dana Transfer Lainnya	b. DAK Nontifik
	B. Dana Insentif Daerah
	C. Dana Otsus dan Dana Keistimewaan DIY
II. DANA DESA	II. DANA DESA

1	Dana Insentif Daerah
2	Bantuan Operasional Sekolah
3	Tunjangan Profesi Guru PNSD
4	Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil
5	Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)

Postur TKDD mengalami perubahan dengan reklasifikasi dan *refocusing* Dana Transfer lainnya selain Dana Insentif Daerah menjadi DAK Non Fisik

INSTRUMEN DESENTRALISASI FISKAL: APBN UNTUK Mendukung Pertumbuhan & Pembangunan yang Inklusif

Ekuivalensi pendapatan & belanja antarwilayah untuk memperkuat pelaksanaan Nawacita ketiga, desentralisasi fiskal dan otonomi daerah, serta memperkuat eksistensi NKRI (Jawa mensubsidi wilayah lain di luar Jawa)



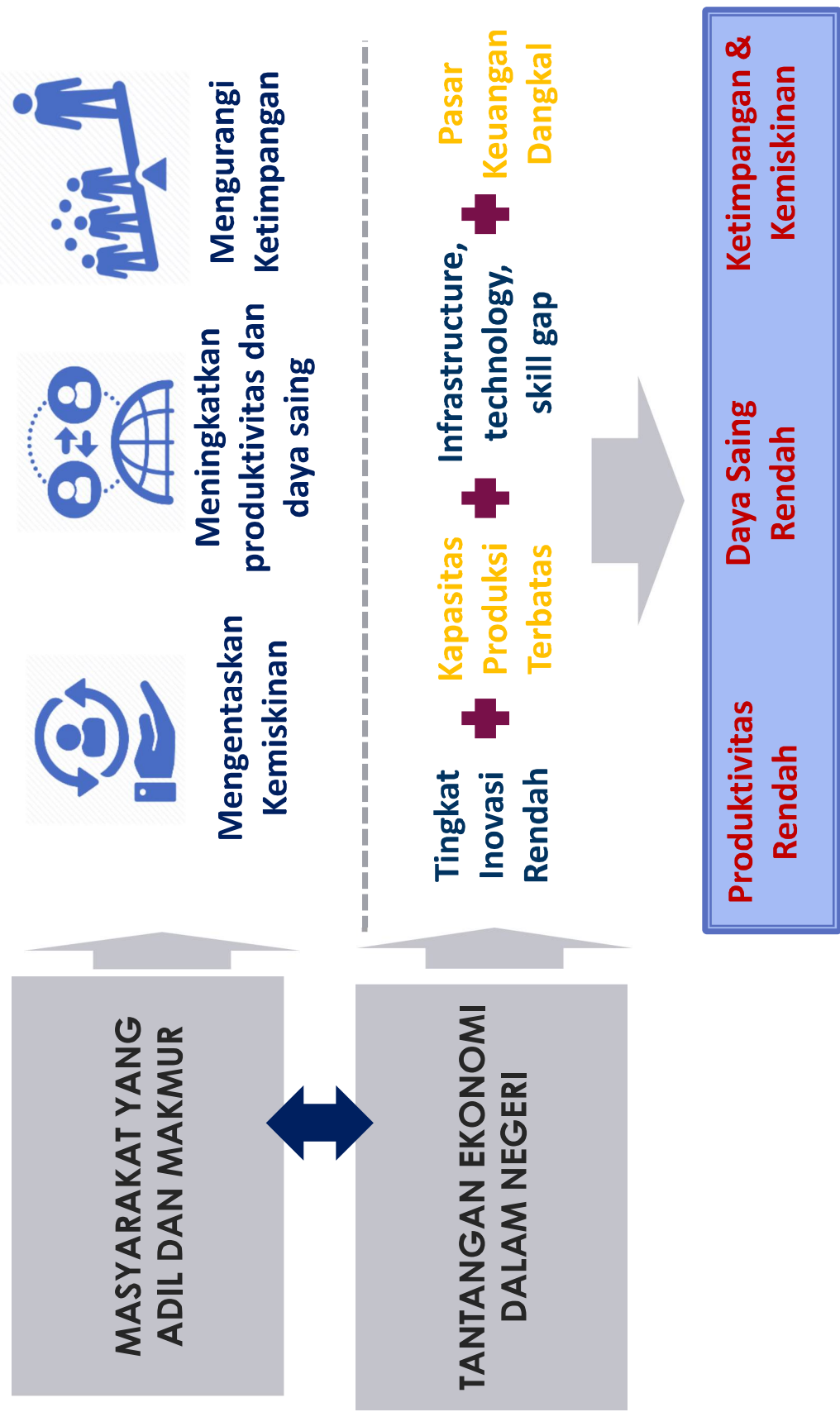
Keterangan:

1. Pendapatan → yang dikumpulkan dari Daerah ke Pusat
2. Belanja → yang dikembalikan dari Pusat ke Daerah
3. Data dalam Triliun Rp
4. Data rata-rata 2014-2016

Kebijakan ekspansi anggaran di luar Jawa dimaksudkan untuk mendukung akselerasi pembangunan di luar Jawa dalam mempercepat ekualisasi kemajuan antara wilayah Jawa dengan luar Jawa.

TANTANGAN PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL #1

Agar Cita-Cita Masyarakat Adil, Makmur, Sejahtera tercapai, Setiap Kebijakan harus diformulasikan dengan baik sesuai tantangan yang ada

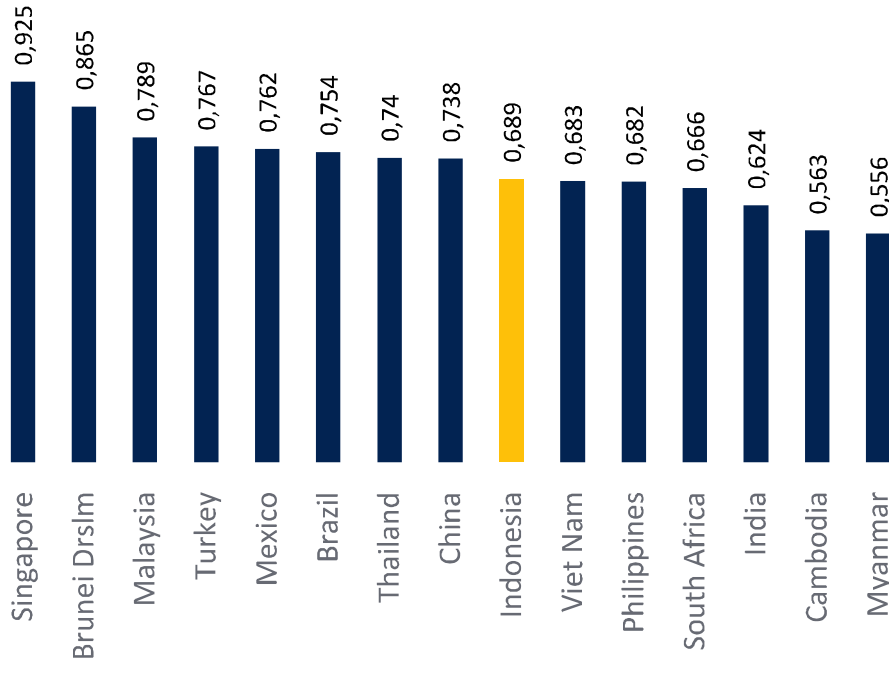


HDI Indonesia Masih Perlu Ditingkatkan

- 69,55 IPM
- 70,9 tahun Angka Harapan Hidup Saat Lahir
- 7,95 tahun Rata-rata Lama Sekolah
- 12,72 tahun Harapan Lama Sekolah
- Rp 10.420.000 Pengeluaran per Kapita per tahun yang Disesuaikan

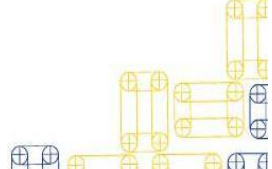
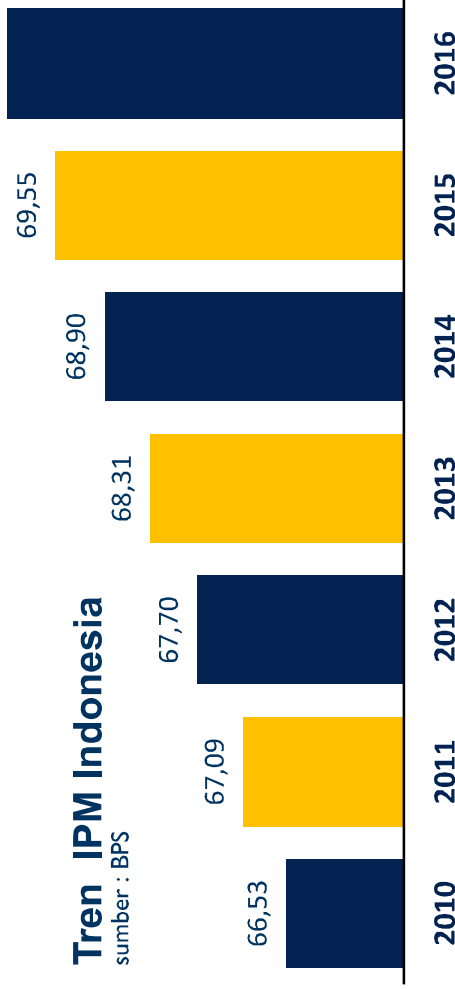
Human Development Index 2015

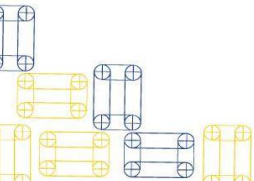
sumber : UNDP



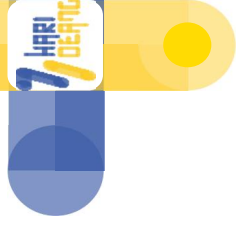
Tren IPM Indonesia

sumber : BPS



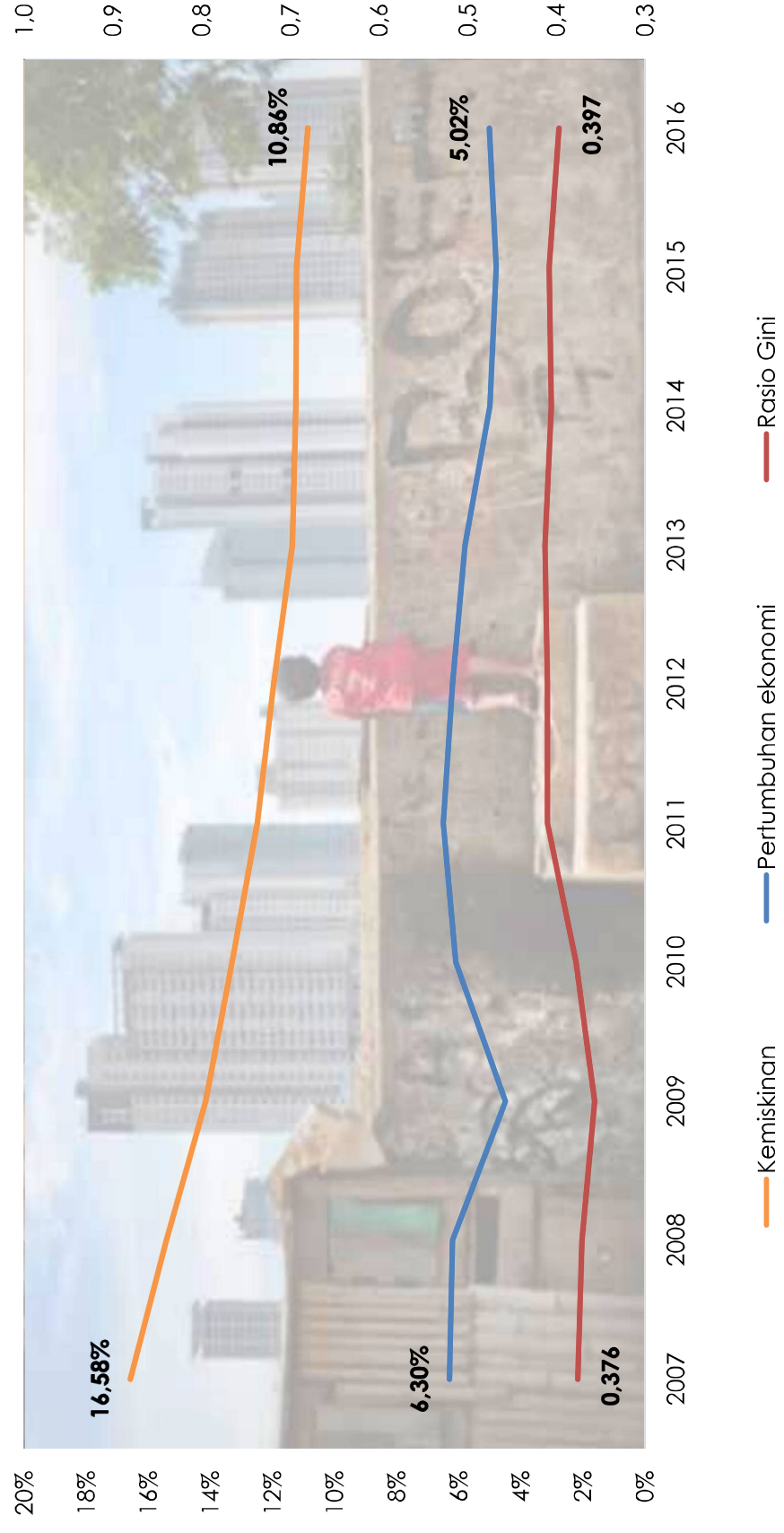


TANTANGAN PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL #3

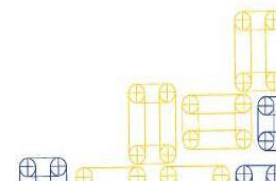


Tingkat kemiskinan menunjukkan penurunan yang konstan selama 1 dasawarsa terakhir, tetapi akselerasi penurunan semakin lama semakin melambat, desain kebijakan untuk pengurangan kemiskinan harus terus ditingkatkan kualitasnya....

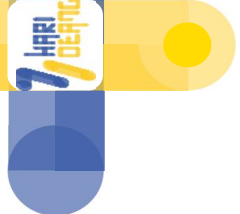
Pertumbuhan, Kemiskinan, dan Kesenjangan, 2007-2016



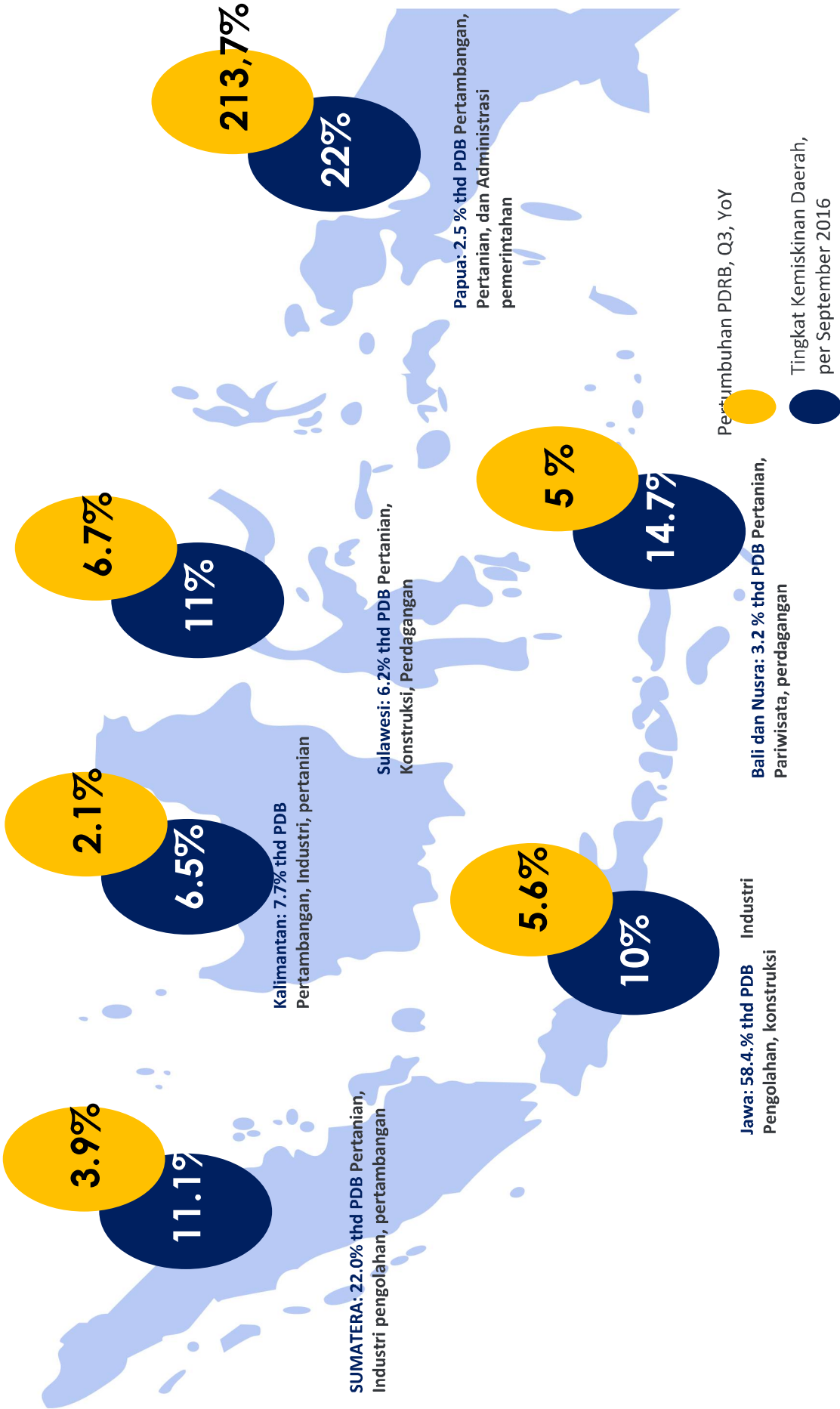
- INTEGRITAS
- PROFESIONALISME
- SINERGI
- PELAYANAN
- KESEMPURNAAN



TANTANGAN PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL #4

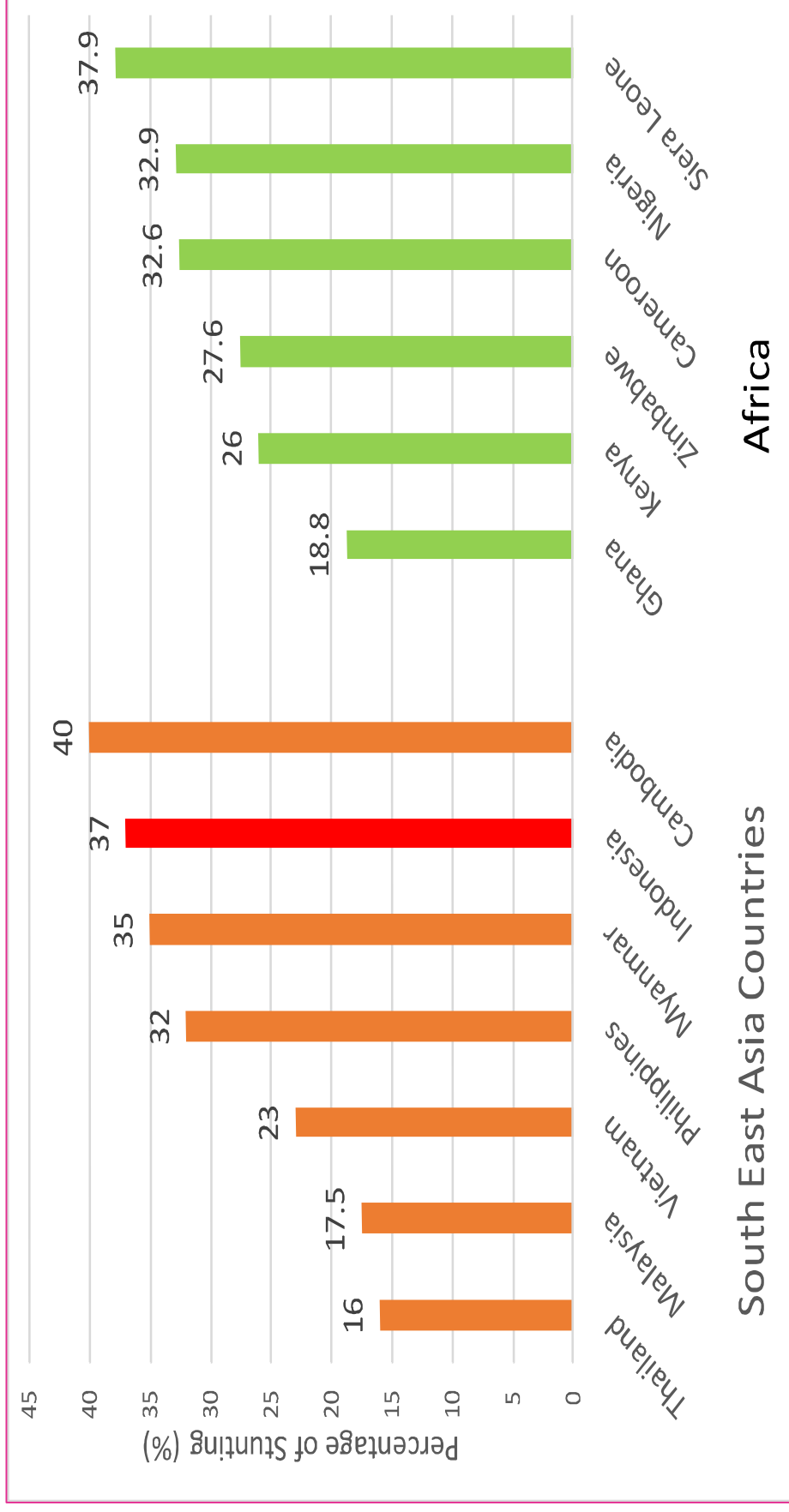


Ketimpangan (Inequality) masih terjadi, tidak hanya antar kelompok masyarakat, namun juga masih adanya disparitas antar pulau di wilayah Indonesia




- INTEGRITAS
- PROFESIONALISME
- SINERGI
- PELAYANAN
- KESEMPURNAAN

Setiap bayi yang lahir di Indonesia harus mendapatkan pelayanan yang sama



1. Indonesia adalah satu dari 11 negara dengan kinerja terburuk dalam mengurangi masalah malnutrisi. (Global Nutrition Report, 2015)
2. Malnutrisi menyebabkan *Stunting* pada balita. Saat ini tingkat *stunting* di Indonesia adalah tertinggi ke dua di Asia Tenggara setelah Kamboja, bahkan lebih tinggi dari beberapa negara Afrika.
3. Malnutrisi pada pada 1000 hari pertama usia balita menyebabkan perkembangan otaknya terhambat dan berpengaruh pada kualitas penyerapan pelajaran/pengetahuan di masa mendatang.


Desentralisasi Fiskal memiliki tujuan yang mulia. Kita yang terlibat di dalamnya mengemban amanah yang tidak ringan. Janganlah pengelolaan anggaran dikotori oleh tindak penyelewengan dan korupsi




71

Perkara Tindak
Pidana Korupsi
di Tingkat
Provinsi

Perkara Tindak
Pidana Korupsi di
Tingkat
Kabupaten/Kota



Laporan Tahunan KPK, 2015



343

kepala daerah yang
berperka hukum di
kejaksaan, kepolisian, dan
KPK. Sebagian besar
karena tersangkut
masalah pengelolaan
keuangan daerah

Data Kemendagri,
Januari, 2016

16,050

Faktor-Faktor Penyebab
Kepala Daerah Korupsi

Monopoli kekuasaan	
Diskresi kebijakan	
Lemahnya Akuntabilitas	
Faktor Lainnya:	<ul style="list-style-type: none"> biaya pemilkada langsung yang mahal; kurangnya kompetensi dalam pengelolaan keuangan daerah; kurang pahamiya peraturan; dan pemahaman terhadap konsep budaya yang salah



Laporan BPKP, 2016

“Mewujudkan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dalam bentuk peningkatan dan pemerataan kualitas layanan publik dan kesejahteraan rakyat di seluruh wilayah Republik Indonesia”



- Peningkatan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah;
- Penguatan instrument hubungan keuangan antara pusat dengan daerah dan antardaerah guna mengoptimalkan pendanaan kewenangan daerah;
- Efektivitas pengelolaan sumber-sumber pendanaan daerah untuk mewujudkan perbaikan layanan publik dan kesejahteraan;
- Memperbaiki kualitas pengelolaan belanja daerah;

- Memperkuat sinkronisasi belanja K/L dengan belanja pemerintah daerah;
- Menjaga kesinambungan fiskal nasional dan daerah melalui pengelolaan TKD dan pembiayaan daerah yang terkendali;
- Memperkuat sinergi antara K/L, internal pemda & antar pemda;
- Memperkuat pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
- Memperkuat sistem informasi keuangan daerah untuk menjaga kualitas hubungan keuangan pusat dan daerah.

